

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman**

Kabupaten Sleman adalah salah satu daerah yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km<sup>2</sup>, dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya, mulai dari sumber daya air, ekowisata, pertanian, sumber bahan batu putih, ekonomi dan lain – lain. Berdasarkan karakteristik sumber daya yang terdapat di Kabupaten Sleman, maka dapat dibagi menjadi 4 wilayah :

1. Kawasan Lereng Gunung Merapi, kawasan ini merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya air dan ekowisata yang bertempat dan berorientasi pada keindahan gunung Merapi serta ekosistemnya.

Wilayah ini dimulai dari jalan kota Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan sampai dengan puncak gunung Merapi;

2. Kawasan Timur, kawasan ini meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan serta Kecamatan Berbah. Potensi yang terdapat dalam kawasan timur adalah sebagai pusat wisata budaya karena terdapat tempat peninggalan purbakala (candi), selain itu kawasan ini merupakan daerah lahan kering namun terdapat sumber bahan batu kering;
3. Kawasan Tengah. Pusat pendidikan, perdagangan dan jasa terletak pada kawasan tengah di Kabupaten Sleman. Kawasan ini terdiri dari wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping.
4. Kawasan Barat yang merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendog, bambu serta gerabah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan.

Pembagian wilayah selain dapat dilihat berdasarkan sumber daya dapat pula dilihat berdasarkan jalur lintas antar daerah serta berdasarkan pusat – pusat pertumbuhan wilayah. Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping

juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasarkan letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

1. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
2. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.
3. Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

## **B. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman**

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang berprestasi, salah satu prestasinya yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah yang mendapatkan Penghargaan Anugerah Dana Rakca pada Tahun 2016, penghargaan tersebut hanya diraih oleh 6 provinsi serta 29 kabupaten/kota. Penghargaan Anugerah Dana Rakca merupakan apresiasi terhadap daerah atas kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah maupun dalam pemanfaatan Dana Intensif Daerah (DID), selain itu indikator yang menjadikan Kabupaten Sleman mendapatkan Anugerah Dana Rakca adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik yang baik, penilaian WTP serta pemanfaatan APBD secara optimal.

Pendapatan di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari mulai tahun 2014 sampai tahun 2015, peningkatan pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan secara keseluruhan yang telah ditambahkan dengan Dana Perimbangan maupun peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 2,07 Triliun melebihi rencana pendapatan yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 1,96 Triliun sementara untuk PAD di tahun 2014 berjumlah Rp. 573 Juta melebihi rencana PAD yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 474 Juta.

**Tabel 2.1.**  
**Pendapatan Kabupaten Sleman Tahun 2014**

Uraian	Catatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.1.1</b>	<b>1.969.264.200.317,70</b>	<b>2.076.820.131.084,13</b>	<b>105,46</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>474.917.917.941,46</b>	<b>573.337.599.560,11</b>	<b>120,72</b>
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	282.100.000.000,00	326.033.995.236,66	115,57
Pendapatan Retribusi	5.1.1.1	35.114.444.240,00	42.632.198.781,03	121,41
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1	23.747.000.000,00	23.654.901.728,19	99,61
Lain – lain PAD yang Sah	5.1.1.1	133.956.473.701,46	181.016.503.814,23	135,13
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>1.494.346.282.376,24</b>	<b>1.499.148.394.633,56</b>	<b>100,32</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>1.048.511.113.184,00</b>	<b>1.034.404.522.916,00</b>	<b>98,65</b>
Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2	43.734.248.160,00	41.222.388.370,00	94,26
Bagi Hasil Bukan Pajak	5.1.1.2	0,00	384.280.433,00	0,00
Bagi Hasil Cukai	5.1.1.2	4.001.153.024,00	4.190.444.113,00	104,73
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2	952.102.502.000,00	952.102.502.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2	46.573.210.000,00	36.504.908.000,00	75,00
<b>Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>280.695.737.070,00</b>	<b>274.661.712.000,00</b>	<b>97,85</b>
Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	5.1.1.2	254.817.230.070,00	248.783.205.000,00	97,63
Dana Intensif Khusus	5.1.1.2	25.878.507.000,00	25.878.507.000,00	100,00
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>165.139.432.122,24</b>	<b>190.082.159.717,56</b>	<b>115,10</b>
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	5.1.1.2	136.308.645.122,24	165.068.472.717,56	121,10
Bantuan Keuangan dari Prov. dan Pemda Lainnya	5.1.1.2	26.830.787.000,00	25.013.687.000,00	86,76
<b>Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334.136.890,46</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan Hibah	5.1.1.3	0,00	4.334.136.890,46	0,00
Pendapatan dari Piutang PBB-P2 yang Belum Diserahterimakan	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD 2014

Pada tahun 2015 pendapatan meningkat menjadi Rp. 2,29 Triliun sementara rencana yang dianggarkan sebesar Rp. 2,26 Triliun. Sumbangan pendapatan terbanyak pada tahun 2015 adalah bersumber dari Dana Perimbangan yaitu sebesar Rp. 1,08 Triliun kemudian sumbangan pendapatan terbanyak kedua adalah dari PAD yang berjumlah Rp. 643 Juta sementara rencana PAD yang

dianggarkan adalah Rp. 577 Juta, sehingga jika dipersentasekan mencapai 111,35%, PAD ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang telah dibahas pada paragraf diatas. Untuk rincian pendapatan di Kabupaten Sleman pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Pendapatan Kabupaten Sleman Tahun 2015**

Uraian	Catatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.1.1</b>	<b>2.262.230.417.718,80</b>	<b>2.294.622.746.756,22</b>	<b>101,43</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>577.585.009.141,24</b>	<b>643.130.079.828,03</b>	<b>111,35</b>
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	346.000.000.000,00	373.137.768.070,80	107,84
Pendapatan Retribusi	5.1.1.1	41.145.280.060,00	45.052.207.026,81	109,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1	34.169.550.953,24	34.330.598.540,50	100,47
Lain – lain PAD yang Sah	5.1.1.1	156.270.178.128,00	190.609.506.189,92	121,97
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>1.101.084.018.000,00</b>	<b>1.080.162.444.931,00</b>	<b>98,10</b>
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	5.1.1.2	55.456.490.000,00	38.281.936.931,00	69,03
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2	984.410.612.000,00	984.410.612.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2	33.168.100.000,00	29.421.080.000,00	88,70
Alokasi Dana Desa	5.1.1.2	28.048.816.000,00	28.048.816.000,00	100,00
<b>Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>583.561.390.577,56</b>	<b>571.330.239.997,09</b>	<b>97,90</b>
Pendapatan Hibah	5.1.1.3	7.667.324.250,00	5.132.097.396,00	66,93
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.3	201.746.717.327,56	198.089.393.601,09	98,19
Dana Penyesuaian	5.1.1.3	340.866.799.000,00	340.866.799.000,00	100,00
Lainnya	5.1.1.3	33.280.550.000,00	27.241.950.000,00	81,86

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD 2015

Realisasi APBD juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dan diapresiasi di Kabupaten Sleman karena mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan yang ditunjukkan oleh Kabupaten Sleman dalam realisasi penggunaan APBD dari mulai tahun 2014, 2015 serta 2016. Pada tahun 2014 persentase realisasi anggaran mencapai 82,86% yaitu sekitar Rp. 1,89 Triliun dari jumlah total anggaran Rp. 2,28 Triliun. Perhitungan tersebut hanya berdasarkan pada

Belanja Anggaran diantaranya Belanja Operasi, Belanja Modal, serta Belanja Tak Terduga termasuk Transfer Bagi Hasil. Rincian realisasi anggaran tersebut diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel. 2.3.**  
**Realisasi APBD Kabupaten Sleman Tahun 2014**

Uraian	Catatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>	<b>2.288.645.856.406,56</b>	<b>1.896.477.377.488,36</b>	<b>82,86</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>	<b>1.792.142.435.143,27</b>	<b>1.542.756.893.656,11</b>	<b>86,08</b>
Belanja Pegawai	5.1.2.1	1.288.392.920.497,27	1.110.060.035.820,14	86,16
Barang dan Jasa	5.1.2.1	402.709.029.480,00	351.490.651.032,79	87,28
Bunga	5.1.2.1	144.000.000,00	12.341.084,68	8,57
Subsidi	5.1.2.1	0,00	0,00	0,00
Hibah	5.1.2.1	59.195.408.166,00	40.979.605.718,50	69,23
Bantuan Sosial	5.1.2.1	41.701.077.000,00	40.214.260.000,00	96,43
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>	<b>387.231.175.442,00</b>	<b>282.862.049.259,00</b>	<b>73,05</b>
Belanja Tanah	5.1.2.2	58.805.400.000,00	17.763.305.909,00	30,21
Peralatan dan Mesin	5.1.2.2	80.272.887.776,00	58.797.899.977,00	73,25
Gedung dan Bangunan	5.1.2.2	147.369.407.554,00	125.749.831.238,00	85,33
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2	91.100.401.870,00	77.800.572.649,00	85,40
Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2	9.683.078.242,00	2.750.439.486,00	28,40
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>	<b>26.291.746.590,29</b>	<b>841.163.588,00</b>	<b>3,20</b>
<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.2.4</b>	<b>82.980.481.285,00</b>	<b>70.017.270.985,25</b>	<b>84,38</b>
Bagi Hasil ke Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	5.1.2.4	41.583.030.285,00	34.793.261.504,00	83,67
Bantuan Keuangan ke Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	5.1.2.4	41.397.451.000,00	35.224.009.481,25	85,09

*Sumber :Laporan Pertanggungjawaban APBD 2014*

Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu menjadi 84,05% sama halnya dengan tahun 2014 bahwa perhitungan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Anggaran yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga serta Transfer Bagi Hasil. Rincian realisasi Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.4.**  
**Realisasi APBD Kabupaten Sleman Tahun 2015**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>BELANJA</b>	<b>2.770.682.731.330,03</b>	<b>2.328.751.919.925,33</b>	<b>84,05</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.533.934.299.755,03</b>	<b>1.298.797.514.723,91</b>	<b>84,67</b>
Belanja Pegawai	1.211.671.936.408,62	1.033.804.728.931,07	85,32
Belanja Bunga	1.500.000.000,00	258.765.334,00	17,25
Hibah	53.179.657.288,00	50.913.755.411,00	95,74
Bantuan Sosial	42.208.268.730,00	38.703.752.000,00	91,70
Bagi Hasil ke Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	46.656.578.228,00	41.101.803.027,00	88,09
Bantuan Keuangan ke Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	139.250.082.466,40	133.725.021.327,00	96,03
Belanja Tidak Terduga	39.467.776.634,01	289.688.693,84	0,73
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.236.748.431.575,00</b>	<b>1.029.954.405.201,42</b>	<b>83,28</b>
Belanja Pegawai	176.067.607.068,00	163.717.705.627,00	92,99
Barang dan Jasa	520.520.553.287,00	439.453.872.165,57	84,43
Belanja Modal	540.160.271.220,00	426.782.827.408,85	79,01

*Sumber :Laporan Pertanggungjawaban APBD 2015*

Berdasarkan tabel diatas menyebutkan bahwa Realisasi Anggaran pada Tahun 2015 berjumlah Rp. 2,32 Triliun dari total anggaran sebesar Rp. 2,77 Triliun, anggaran pada tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya berjumlah Rp. 2,28 Triliun, namun dalam hal penyerapan anggaran pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan. Perbaikan dalam hal penyerapan anggaran terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, hal tersebut juga ditunjukkan pada Realisasi Anggaran Tahun 2016. Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun 2016 mencapai 92,73% yaitu mencapai Rp. 2,45 Triliun dari total Anggaran sebesar Rp. 2,64 Triliun.

Disamping terjadinya peningkatan dalam hal Realisasi Anggaran, Kabupaten Sleman juga merupakan daerah yang konsisten mendapatkan opini WTP dari BPK dari mulai tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Pemberian opini WTP merupakan penilaian dari BPK terhadap LKPD yang memenuhi kriteria, diantaranya ; sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji atas pos – pos laporan keuangan, sehingga dapat dikatakan dari tahun 2013 sampai 2016 pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman dilaksanakan secara maksimal. Opini WTP merupakan opini terbaik yang diberikan BPK atas pemeriksaan keuangan daerah, adapun opini lain yaitu WTP-DPP yang artinya segala kriteria telah dipenuhi namun terdapat Paragraf Penjelas untuk memperbaiki pos – pos laporan yang kurang tepat, selanjutnya terdapat WDP yang artinya kriteria sistem pengendalian internal memadai namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Opini selanjutnya adalah TMP, yaitu apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan sistem pengendalian internal sangat lemah. Terakhir adalah opini TW yaitu diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji yang banyak pada pos – pos laporan keuangan, secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar.

Penilaian WTP menjadi salah satu tolak ukur bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan menjalankan prinsip *Good Governance*, pasalnya apabila suatu daerah mendapatkan opini WTP dari BPK maka artinya daerah tersebut telah melaksanakan prinsip Akuntabilitas serta kepatuhan terhadap hukum, kedua

prinsip tersebut merupakan bagian dari *Good Governance* seperti yang dijelaskan oleh UNDP. Selaras dengan tujuan Kabupaten Sleman yang menyebutkan bahwa landasan yang digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan adalah *Good Governance* yang telah dibuktikan dengan melaksanakannya *Open Government* untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.